

## ABSTRAK

Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, dibuatkan beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu saja. Biasanya dakwaan ini dibuat jika penuntut umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan terdakwa paling tepat atas kesalahannya. Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan bersifat saling mengecualikan. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwaan terbukti menurut keyakinannya. Oleh karena itu dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (*keuze telastelgging*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) implikasi yuridis bentuk dakwaan alternatif dalam perkara nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora, (2) dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora dengan dakwaan alternatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam penyusunan dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya. Penyusunan dakwaan pada kasus putusan nomor 82/Pid.B/2019/PN Bla berdasar Pasal 378 KUHP, dengan alternatif Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini unsur yang saling menghapuskan satu sama lain ialah mengenai “beradanya” barang pada penguasaan terdakwa. Bila beradanya barang tersebut adanya di dalam penguasaan terdakwa adalah sebagai akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini telah terjadi delik penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP, (2) Dalam putusan nomor 82/Pid.B/2019/PN Bla, hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dakwaan alternatif Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya: Unsur barang siapa, Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

**Kata Kunci: Kebijakan Hakim, Perkara Tindak Pidana, Dakwaan Alternatif**

## ABSTRACT

In compiling alternative indictments, several indictments were made, but only one was made. Usually this indictment is made if the public prosecutor is hesitant to apply which article of the deed committed by the defendant is most appropriate for his guilt. In this alternative indictment each indictment is mutually exclusive. The judge will choose one of the charges proven according to his conviction. Therefore the alternative indictment is also called the optional indictment (*keuze telastelgging*).

This study aims to determine, study and analyze: (1) juridical implications of alternative forms of indictment in case number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora, (2) the basis for the judge's consideration in deciding case No. 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora with alternative charges. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) In the alternative drafting of this indictment an alternative is given which depends on how developments in the trial regarding which indictment is proven. Generally these indictments which are prepared in an alternative way the article eliminates each other in the sense that if certain elements have been proven the other elements are definitely not proven, and vice versa. The preparation of the indictment in case number 82 / Pid.B / 2019 / PN Bla based on Article 378 of the Criminal Code, with an alternative Article 372 of the Criminal Code. In this case, the element that eliminates one another is about the "existence" of the goods in the possession of the defendant. If the existence of such goods is in the possession of the defendant as a result of persuasion or a series of false words carried out by the defendant then in this case there has been a criminal offense that violates Article 378 of the Criminal Code, (2) In decision number 82 / Pid.B / 2019 / PN Bla, the judge considered that based on the legal facts revealed in the trial the defendant violated the criminal provisions as in the Second Indictment of the alternative indictment Article 378 of the Criminal Code Jo Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code whose elements: whosoever, the element with the intention of benefiting oneself or others against the law, the element by using a false name or false dignity, by deception or a series of lies, the element moves others to hand over something to him or to give debt or write off debts, and The elements of some actions which are related in such a way that must be seen as a continuing action.

**Keywords: Judge Policy, Criminal Case, Alternative Indictment**